

## Orientasi Politik Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019

Fathullah Syahrul <sup>1,\*</sup>  Caroline Paskarina <sup>2,</sup>  dan  
R Widya Setiabudi Sumadinata <sup>3</sup> 

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Padjadjaran, 45363, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Padjadjaran, 45363, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

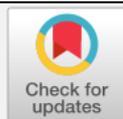
<sup>3</sup> Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Padjadjaran, 45363, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

\* Korespondensi: [fathullah18001@mail.unpad.ac.id](mailto:fathullah18001@mail.unpad.ac.id)

### INFO ARTIKEL

#### Info Publikasi:

Artikel Hasil Penelitian



#### Sitasi Cantuman:

Syahrul, F., Caroline, P., & Sumadinata, R. W. S. (2020). The Political Orientation of Extra-Campus Student Organizations in the 2019 Presidential Election. *Society*, 8(2), 486-505.

DOI: [10.33019/society.v8i2.201](https://doi.org/10.33019/society.v8i2.201)

Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society

OPEN  ACCESS



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis orientasi politik organisasi kemahasiswaan ekstra kampus dalam pemilihan presiden tahun 2019 di kota Makassar dengan menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan studi pustaka. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya faktor internal yang berhubungan dengan kondisi internal organisasi kemahasiswaan ekstra kampus pada Pilpres 2019 di kota Makassar. Kondisi internal tersebut antara lain mendorong kadernya agar matang secara politik dan demokratis, menjaga netralitas dan idealisme kader, serta menjaga keutuhan bangsa dan negara. Selain itu, mereka mengawasi pemerintah dengan melakukan dialog dan diskusi. Pada saat yang sama, mereka mengimplikasikan bahwa agenda politik Pilpres 2019 adalah ajang pembelajaran dan menolak politik praktis serta mengawasi visi misi dan setiap kebijakan pemerintah dengan melakukan kajian. Faktor eksternal berkaitan dengan pengaruh dari luar organisasi kemahasiswaan ekstra kampus yaitu organisasi alumni. Kedelapan organisasi kemahasiswaan ekstra kampus yang terdiri dari HMI, PMKRI, GMKI, GMNI, PMII, IMM, KAMMI, dan GEMA Pembebasan menyatakan tidak ada intervensi untuk memilih satu pasangan calon pada Pilpres 2019 di kota Makassar berdasarkan arahan organisasi alumni. Terdapat tiga orientasi politik dalam organisasi kemahasiswaan

**Dikirim:** 17 Juni, 2020;  
**Diterima:** 19 Agustus, 2020;  
**Dipublikasi:** 30 November, 2020;

*ekstra kampus di kota Makassar: pertama, orientasi politik kognitif, kedua, orientasi politik afektif, dan ketiga, orientasi politik evaluatif.*

**Kata Kunci:** Lembaga Penyelenggara Pemilu, Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus; Orientasi Politik, Pemilihan Umum; Pemilihan Umum Presiden

## 1. Pendahuluan

Menurut tinjauan sejarah, ada empat periode/fase utama pergerakan mahasiswa di Indonesia, yaitu 1) periode pergerakan nasional (1900-1945); 2) periode orde lama (1945-1965), 3) periode orde baru (1965-1998); dan periode reformasi (1998-sekarang). Pada periode orde baru 1965-1998, gerakan mahasiswa dan tatanan politik di Indonesia bergerak dinamis dalam beberapa fase besar. Salah satu organisasi kemahasiswaan saat itu adalah Concentration of Indonesian Student Movements (CGMI), yang menonjol setelah kemenangan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1955. Dampak dari demokrasi liberal pada tahun 1950-1959 adalah berdirinya organisasi mahasiswa ekstra kampus seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Sosialis (GeMSos), dan lain-lain (Berita Bojonegoro, 2015).

HMI, GMNI, PMII, GMKI, PMKRI, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Gerakan Mahasiswa Pembebasan (GEMA Pembebasan) merupakan organisasi mahasiswa ekstra kampus yang terlibat aktif dalam pemilihan presiden 2019. Organisasi mahasiswa ekstra kampus merupakan salah satu elemen masyarakat yang merespon secara masif isu-isu dinamika politik.

Momentum pemilihan presiden tahun 2019 di kota Makassar memunculkan fenomena soliditas antar organisasi kemahasiswaan ekstra kampus. Organisasi mahasiswa ekstra kampus bersinergi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta menolak keberadaan para aktor politik yang dianggap memecah belah persatuan.

Organisasi kemahasiswaan ekstra kampus dalam pemilihan presiden 2019 tidak terlibat dalam politik praktis. Tidak ada aturan dan dasar hukum yang melarang mahasiswa ekstra kampus dalam politik praktis. Aturan untuk melarang organisasi mahasiswa ekstra kampus dari politik praktis hanya ditemukan di peraturan internal masing-masing, yang dikenal sebagai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

**Tabel 1. Aturan Pelarangan pada Organisasi dalam Politik Praktis**

No.	Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus	Aturan
1	HMI	Pasal 6, Bab III: Tujuan, Usaha, dan Sifat, menyatakan bahwa Himpunan Mahasiswa Islam bersifat independen.

No.	Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus	Aturan
2	PMKRI	Ketetapan MPA Nomor 13/TAP/MPA12/1998 pada butir 7 menyebutkan bahwa untuk organisasi politik, perangkapan fungsionaris anggota PMKRI tidak diperbolehkan untuk menjamin independensi organisasi.
3	GMKI	Butir 1 Pasal 5: Status dan Bentuk Organisasi, menyatakan bahwa organisasi ini adalah organisasi gerejawi dan bukan bagian dari organisasi politik.
4	GMNI	Pasal 4 butir 2 pada Bab III: Tujuan dan Sifat, menyebutkan bahwa GMNI adalah organisasi yang bersifat Independen, bebas aktif, serta bersifat kerakyatan.
5	PMII	Pasal 3 butir E menyebutkan bahwa PMII adalah organisasi independen. Hal itu juga dipertegas dengan pernyataan independen PMII pada tanggal 14 Juli 1972, pada Konferensi PMII ke-2 di Murnajati, Malang, Jawa Timur yang dikenal dengan Deklarasi Murnajati.
6	IMM	<i>Khittah</i> Muhammadiyah di Denpasar pada tahun 2002 menyatakan bahwa IMM bersifat independen terhadap kepentingan politik praktis.
7	KAMMI	Pasal 6, Bab III: Asas, Sifat, Visi, dan Misi, menyatakan bahwa KAMMI bersifat terbuka dan independen.

Sumber: Data Primer (2020)

Gerakan Mahasiswa (GEMA) Pembebasan adalah organisasi mahasiswa ekstra kampus yang relatif baru. Organisasi yang didirikan pada tahun 2002 di kota Makassar untuk membantu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam melakukan infiltrasi ke mahasiswa tanpa secara langsung menggunakan nama HTI (Chaidherrahtman, 2015).

GEMA Pembebasan mengarusutamakan ideologi Islam di Indonesia. Gerakan ini muncul terkait erat dengan berbagai isu, seperti tidak adanya proses penegakan hukum yang adil dan sungguh-sungguh, serta ketidakadilan di bidang sosial, ekonomi, dan politik (Sumtaki, 2003). Organisasi ini masih tergolong baru, sehingga eksistensinya dalam politik elektoral belum begitu terlihat. Dengan kata lain, organisasi lebih fokus pada penguatan pola rekrutmen baik dalam studi/seminar maupun melakukan kampanye melalui media sosial.

Terdapat beberapa pertimbangan dalam pemilihan delapan organisasi kemahasiswaan ekstra kampus di kota Makassar sebagai berikut: pertama, organisasi kemahasiswaan ekstra kampus yang aktif mengembangkan ideologi melalui sistem kader internal organisasi; kedua, organisasi kemahasiswaan ekstra kampus yang aktif menyikapi dinamika politik dalam momentum pemilihan presiden tahun 2019 di kota Makassar; dan yang ketiga, organisasi mahasiswa ekstra kampus memiliki anggota yang tersebar di berbagai universitas/perguruan tinggi.

Tabel 2. Sebaran Kader Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus Tahun 2019

No.	Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus	Jumlah Kader	Afiliasi
1	GEMA Pembebasan	60	Universitas Hassanuddin, Universitas Negeri Makassar, UIN Alauddin Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar
2	GMKI	80	Universitas Hassanuddin, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Universitas Bosowa
3	PMKRI	90	Universitas Atmajaya, Universitas Pancasakti, Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI)
4	KAMMI	350	Universitas Hassanuddin, Universitas Negeri Makassar, UIN Alauddin Makassar
5	GMNI	470	Universitas Hassanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas Pancasakti
6	IMM	500	Universitas Hassanuddin, Universitas Negeri Makassar, UIN Alauddin Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar
7	HMI	900	Universitas Hassanuddin, Universitas Negeri Makassar, UIN Alauddin Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Universitas Bosowa, Universitas Islam Makassar (UIM)
8	PMII	1.100	Universitas Hassanuddin, Universitas Negeri Makassar, UIN Alauddin Makassar, Universitas Bosowa, Universitas Islam Makassar (UIM), Universitas Muhammadiyah Makassar, STMIK Handayani, STMIK Dipanegara
<b>Total</b>		<b>3.550</b>	

Sumber: Data Primer (2020)

Enam organisasi mahasiswa ekstra kampus menggelar jumpa pers pada Kamis, 3 November 2016, terkait aksi masif ribuan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan dalam aksi demo menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diproses secara hukum. PMII, GMKI, PMKRI, KMHDI (Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia), GEMA INTI (Generasi Muda Tionghoa Indonesia), dan GMNI se-Sulawesi Selatan tidak akan ambil bagian dalam aksi tersebut karena mereka tahu pasti langkah tersebut hanya akan membawa isu yang sengaja mengarah pada politik praktis (Tribun Makassar, 2016).

Selain itu, organisasi kemahasiswaan ekstra kampus juga terlibat dalam membantu tugas dan fungsi penyelenggara pemilihan umum. Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengajak elemen masyarakat lain untuk mengawal pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan digelar serentak pada 17 April 2019, ditegaskan melalui gerakan literasi #2019HMIMengawalDemokrasi (Berita Kota Makassar, 2018).

Beberapa organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Makassar mengadakan pertemuan dan jumpa pers di Kota Makassar, Selasa, 28 Mei 2019. Pertemuan tersebut sebagai wujud komitmen dan eksistensi organisasi kemahasiswaan ekstra kampus dalam menjaga persatuan dan kesatuan usai pemilihan presiden tahun 2019 (Serikat News, 2019).

Organisasi kemahasiswaan di luar kampus seringkali menghadapi politik praktis karena dianggap cukup berpengaruh dalam mengubah suatu bangsa. Aktor yang memiliki kepentingan politik dalam Pilpres 2019 di Makassar terus melirik organisasi kemahasiswaan ekstra kampus sebagai sarana untuk mendapatkan suara, apalagi aktor politik tersebut juga mantan aktivis di organisasi kemahasiswaan ekstra kampus.

Dalam pemilihan umum tahun 2019 di kota Makassar, Muhammadiyah (organisasi Islam di Indonesia), yang memiliki hubungan struktural yang erat dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, pernah merekomendasikan salah satu kandidat Dewan Perwakilan Daerah (Al-Fatih, A, komunikasi personal, 2 Maret 2020). Selain itu, organisasi mahasiswa ekstra kampus dianggap sebagai afiliasi dari partai politik. Mayoritas kader GMNI terlibat dalam politik melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Mayoritas kader PMII berpolitik melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Mayoritas kader IMM terlibat dalam politik melalui Partai Amanat Nasional (PAN). Sebagian besar kader KAMMI terlibat dalam politik melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tentunya hal ini tidak disengaja, namun ada pengaruh dan kedekatan emosional dan struktural.

Dorongan mahasiswa untuk aktif di partai politik tidak lepas dari pengalaman mahasiswa yang berkecimpung di organisasi (Akbar & Khairulyadi, 2018). Selain faktor-faktor tersebut, kecenderungan mahasiswa yang aktif di organisasi kemahasiswaan ekstra kampus untuk terlibat dalam partai politik adalah kesamaan ideologi, visi dan misi. Dalam pemilihan presiden tahun 2019, delapan organisasi kemahasiswaan ekstra kampus yang terdiri dari HMI, PMKRI, GMKI, GMNI, PMII, IMM, KAMMI, dan GEMA Pembebasan di kota Makassar, menyatakan bahwa secara struktural organisasi ekstra kampus tidak berafiliasi atau berpihak pada partai politik. Kader menjalankan keberpihakan dalam partai politik sebagai tindakan individu, bukan tindakan organisasi.

Penting untuk menganalisis sejauh mana keterlibatan organisasi kemahasiswaan ekstra kampus dalam pemilihan presiden tahun 2019 di kota Makassar dengan menggunakan konsep orientasi politik untuk mengetahui keberpihakan politik delapan organisasi kemahasiswaan ekstra kampus. Penelitian ini akan mendeskripsikan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan.

Di Battista *et al.* (2018), dalam penelitiannya menggunakan konsep moralitas. Ide tersebut digunakan untuk mengeksplorasi asumsi dasar moral Italia dengan menghubungkan wawasan yang jujur dan orientasi politik. Sebagai perbandingan, argumen yang digunakan dalam penelitian saat ini adalah konsep orientasi politik yang dianalisis menggunakan komponen orientasi politik, yaitu orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif. Penelitian ini sejalan dengan eksplorasi orientasi politik.

Yunita & Stanislaus (2014) menjelaskan bahwa dasar orientasi kognitif pemilih adalah visi, misi, dan program kerja. Berdasarkan orientasi afektif, pemilih memiliki tingkat orientasi terhadap citra sosial seorang kandidat. Berdasarkan orientasi evaluatif, pemilih memiliki level orientasi pada identifikasi partai politik.

Farzianto & Rafni (2020) menjelaskan bahwa orientasi kognitif santri masih kurang. Santri kurang pengetahuan tentang pemilu. Orientasi afektif santri juga sangat kurang. Sikap santri yang kurang pada pemilihan umum akan menimbulkan sikap apatis santri. Dalam bentuk

penilaian santri terhadap pemilu, orientasi evaluatif terlihat baik, baik dalam pelaksanaan maupun kelembagaan penyelenggara.

Kedua penelitian di atas mengkaji orientasi politik yang menjadikan pemilih pemula dan santri sebagai sasaran penelitian. Sebagai perbandingan, target penelitian saat ini adalah organisasi kemahasiswaan ekstra kampus. Namun terdapat persamaan antara kedua penelitian di atas dengan penelitian saat ini yaitu menganalisis orientasi politik kognitif, afektif, dan evaluatif.

Fadli (2018) menjelaskan perbedaan orientasi politik sebelum dan sesudah pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Perbedaan hanya terletak pada nama dan organisasi kegiatan para pegiatnya. Sebelum HTI dibubarkan, aktivisnya melakukan aksi atas nama HTI, namun setelah HTI dibubarkan, mereka tidak lagi menggunakan nama HTI. Pembubaran HTI oleh pemerintah semakin memperkuat solidaritas dan kolektivitas HTI. Mantan aktivis HTI masih memiliki pandangan, gagasan, dan aspirasi dalam menegakkan kekhalifahan Islam.

Kurniawan (2017) menjelaskan bahwa orientasi kognitif adalah pengetahuan tentang pemilihan kepala daerah dan figur pemimpin calon. Orientasi afektif yaitu perasaan yang berkaitan dengan masalah ikatan emosional yang dimiliki individu dengan calon pemimpin yaitu suku, ras, persamaan agama, persamaan dalam pilihan politik (partai), dan lain-lain yang memuat perasaan atau ikatan emosional. Orientasi evaluatif adalah gabungan antara pengetahuan calon dan kesamaan tempat tinggal, suku, agama, ras, dan persamaan lainnya.

## 2. Tinjauan Pustaka

Orientasi politik adalah sikap yang dimiliki individu atau kelompok dalam interaksinya dengan kehidupan politik, yang meliputi sikap, nilai, dan perilaku politik. Dalam kajian sistem politik Indonesia, orientasi politik merupakan salah satu aspek partisipasi politik masyarakat. Meski berbeda, namun orientasi dan partisipasi politik terkait satu sama lain (Surbakti, 1992).

Orientasi politik adalah aspek penting dari negara demokrasi. Unsur-unsur aktor dan pendukung demokrasi seperti individu, organisasi, partai politik, kelompok kepentingan, kelas menengah, pekerja, aktivis, masyarakat sipil, cendekiawan, pemuka agama, dan elit politik memiliki orientasi politik berupa keterlibatannya dalam proses politik (Fadli, 2018).

Orientasi seseorang dapat berubah sesuai dengan pengetahuan dan nilainya. Nilai-nilai tersebut akan mempengaruhi dan terkadang dapat membentuk sikap masyarakat secara keseluruhan terhadap suatu orientasi. Hal itulah yang muncul atau menjadi pola sebagai orientasi politik masyarakat. Faktor internal dan eksternal mempengaruhi nilai-nilai tersebut. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu, dalam pendidikan, keluarga, dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu dapat berupa informasi, pengetahuan, lingkungan, teman bermain, dan sebagainya (Sjamsuddin, 1993).

Setiap elemen masyarakat di Indonesia memiliki orientasi politik baik individu maupun kelompok. Kesadaran akan faktor internal yang dipengaruhi dari dalam diri individu dalam pendidikan, keluarga, dan lain-lain untuk membentuk orientasi politik atau kelompok suatu organisasi; sedangkan faktor lingkungan, sistem politik, dan sistem pemerintahan mempengaruhi faktor eksternal.

Berdasarkan pernyataan di atas, faktor orientasi politik individu dan kelompok sangat mempengaruhi organisasi kemahasiswaan ekstra kampus untuk membentuk orientasi politiknya sesuai dengan siklus politik yang sedang berlangsung.

## 2.1. Komponen Orientasi Politik

Menurut [Almond & Verba \(1984\)](#), orientasi politik seseorang terhadap sistem politik dapat dilihat dari tiga komponen diantaranya (1) Orientasi politik kognitif, yaitu pengetahuan seseorang atau masyarakat tentang kepercayaan terhadap politik, perannya dan segala kewajibannya, serta masukan dan keluarannya serta menilai tingkat pengetahuan seseorang tentang jalannya sistem politik, tokoh pemerintahan, kebijakan yang diambil, atau tentang simbol-simbol yang dimiliki oleh suatu sistem politik; (2) Orientasi politik afektif, yaitu perasaan terhadap sistem politik, perannya, aktor dan penampilannya yang membuat seseorang menerima atau menolak suatu sistem politik; (3) Orientasi politik evaluatif, yaitu keputusan dan pendapat tentang objek politik yang biasanya melibatkan kombinasi nilai dan kriteria bersama dengan informasi dan perasaan. Evaluasi moral menentukan orientasi yang dimiliki seseorang dan berkaitan dengan evolusi normatif, moral politik, dan etika politik.

Orientasi kognitif terkait dengan keyakinan politik organisasi kemahasiswaan ekstra kampus pada pemilihan presiden tahun 2019 di kota Makassar. Orientasi afektif berkaitan dengan perasaan organisasi terhadap sistem politik dan respon organisasi mahasiswa ekstra kampus terhadap aktor politik. Sedangkan orientasi evaluatif terkait dengan hal-hal yang dievaluasi oleh organisasi kemahasiswaan ekstra kampus pada momentum pemilihan presiden tahun 2019 di kota Makassar.

## 2.2. Organisasi Kemahasiswaan

Organisasi kemahasiswaan merupakan wadah yang diharapkan dapat menampung segala aktivitas kemahasiswaan dan juga sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan berfikir atau bernalar secara rutin di luar perkuliahan formal serta menyelenggarakan dan membina kepemimpinan. Pembentukan lembaga atau organisasi kemahasiswaan ini bertujuan untuk membantu mahasiswa merealisasikan kekuatan penalaran yang menguntungkan mahasiswa ketika mereka terlibat aktif dalam masyarakat setelah menyelesaikan studi perguruan tinggi mereka ([Joesoef, 1978](#)).

Organisasi kemahasiswaan kampus adalah organisasi yang bergerak di bidang kemahasiswaan yang dilengkapi dengan perangkat teknis yang jelas dan terencana dengan baik seperti struktur, mekanisme, fungsi, prosedur, program kerja, dan unsur lainnya, yang berfungsi untuk mengarahkan semua potensi yang ada dalam organisasi tersebut menuju tujuan atau cita-cita akhir yang ingin dicapai ([Launa, 2000, sebagaimana dikutip dalam Leny & Suyasa, 2010](#)).

Organisasi kemahasiswaan dapat diklasifikasikan sebagai pendidikan nonformal dan informal karena dalam organisasi kemahasiswaan terdapat perencanaan kegiatan tahunan yang disebut rapat kerja tahunan, dan kegiatan diklasifikasikan sebagai pendidikan informal. Karena dalam menjalankan aktivitas di sebuah organisasi kemahasiswaan, pengalaman beraktifitas di lapangan memberikan banyak pendidikan yang baik. Suatu organisasi mempunyai titik kontak dengan lingkungan sosialnya, yaitu kondisi politik, ekonomi, dan budaya yang ada pada waktu tertentu dalam masyarakat tersebut. Proses utama dalam dimensi ini adalah pengaruh siapa yang lebih berpengaruh; organisasi mempengaruhi lingkungan atau lingkungan mempengaruhi organisasi, suatu proses penting untuk pembangunan kelembagaan. Proses pengaruh juga menyangkut otonomi organisasi, sejauh mana organisasi dapat membentengi dirinya sendiri terhadap pengaruh yang tidak semestinya dari luar, selain membuka diri terhadap pengaruh yang sehat ([Pareek, 1996](#)).

Lingkungan sosial adalah arena utama tempat semua organisasi bekerja. Perhatian organisasi terhadap proses sosial adalah penting. Proses sosial yang paling relevan untuk

organisasi kemahasiswaan adalah nilai dan kekuatan. Demikian pula, nilai-nilai apa yang berlaku dalam masyarakat itu penting. Pemahaman nilai dianggap lebih penting dalam masyarakat dan menyangkut karakter apa yang dianggap perlu dalam masyarakat (Pareek, 1996).

Salah satu cara untuk menganalisis lingkungan organisasi adalah dengan meninjau hubungannya dengan organisasi lain di lingkungannya. Setiap organisasi menunjukkan kumpulan organisasi lain yang memiliki hubungan dengan suatu organisasi. Pesaing, konsumen, pemerintah, perkembangan teknologi, sumber bahan baku, sumber keuangan seringkali harus dihadapi dalam bentuk organisasi. Oleh karena itu, suatu organisasi dapat memiliki hubungan dengan ratusan organisasi lain di lingkungannya (Lubis, 2008).

### **2.3. Karakteristik Organisasi Mahasiswa**

Menurut Muhammad (2000), setiap organisasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ciri-ciri tersebut bersifat dinamis, membutuhkan informasi, mempunyai tujuan dan struktur. Terdapat pula pengelompokan karakteristik yang meliputi (1) Dinamis, organisasi yang memiliki sistem terbuka terus berubah karena selalu menghadapi tantangan baru dari lingkungannya dan perlu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang selalu berubah; (2) Membutuhkan informasi, tanpa informasi organisasi tidak dapat berjalan. Oleh karena itu komunikasi memegang peranan penting dalam organisasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan bagi organisasi. Informasi ini diperlukan baik dari dalam organisasi itu sendiri maupun dari luar organisasi; (3) Mempunyai tujuan, organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Semua anggota organisasi harus berbagi tujuan organisasi dengan harapan setiap anggota dapat mendukung tujuan organisasi melalui partisipasi mereka; (4) Terstruktur, pencapaian tujuan organisasi biasanya membuat aturan, hukum, dan hierarki hubungan. Suatu organisasi mengembangkan struktur yang membantu organisasi mengendalikan dirinya sendiri.

## **3. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian ini adalah kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan studi pustaka. Mengikuti metode yang digunakan, analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Informan penelitian berjumlah 24 orang yang terdiri dari tiga unsur yaitu ketua, sekretaris, dan alumni. Ketua dan sekretaris organisasi kemahasiswaan ekstra kampus (HMI, PMKRI, GMKI, GMNI, PMII, IMM, KAMMI, dan Pembebasan GEMA) menjabat pada periode 2019. Alumni yang menjadi pengurus organisasi alumni yang terdiri dari Korps Alumni HMI (KAHMI), Forum Komunikasi Alumni PMKRI, Perkumpulan Senior GMKI, Persatuan Alumni GMNI, Ikatan Alumni PMII, Forum Keluarga Alumni IMM, dan Keluarga Alumni KAMMI. GEMA Pembebasan tidak memiliki organisasi alumni, maka informan yang dipilih adalah informan yang merupakan alumni GEMA Pembebasan Cabang Kota Makassar yang saat ini menjabat sebagai Ketua GEMA Pembebasan Sulawesi Selatan dan Barat. Penelitian ini dilakukan di kota Makassar selama tiga bulan yaitu pada bulan Februari sampai dengan April 2020.

Pemilihan metode penelitian kualitatif ini dikarenakan karakteristik dan permasalahan serta tujuan yaitu untuk memperoleh data analisis deskriptif tentang orientasi politik organisasi kemahasiswaan ekstra kampus dalam Pilpres 2019 di kota Makassar. Selanjutnya penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memecahkan masalah dan mencari jawaban atau pertanyaan penelitian (Afrizal, 2014). Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data penelitian berdasarkan pertanyaan penelitian.

Pemilihan informan penelitian mengikuti tujuan penelitian ini. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Informan tidak didasarkan pada strata, posisi, pedoman, atau bidang tetapi berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu terkait dengan masalah penelitian (Sugiyono, 2013).

Pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditentukan berdasarkan tujuan penelitian. Kriteria dan informan yang ditunjuk atau dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang aktif pada organisasi kemahasiswaan ekstra kampus di kota Makassar yang saat ini menjabat sebagai ketua dan sekretaris periode tahun 2019 dan alumni yang aktif di organisasi alumni masing-masing.

#### 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembahasan ini mengacu pada konsep Sjamsuddin yang menyatakan bahwa nilai dan sikap seseorang dalam menentukan orientasinya ditinjau dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu, pendidikan, keluarga, dan lain-lain. Faktor eksternal yaitu, faktor yang berasal dari luar individu, dapat berupa informasi, pengetahuan, lingkungan, teman bermain, dan lain-lain (Sjamsuddin, 1993).

Faktor internal terkait dengan kondisi internal organisasi kemahasiswaan ekstra kampus pada pemilihan presiden tahun 2019 di kota Makassar. Kondisi internal ini merupakan sikap internal organisasi dalam menyikapi momentum pemilihan presiden tahun 2019 di kota Makassar. Faktor eksternal organisasi kemahasiswaan ekstra kampus adalah faktor diluar struktur tetapi masih memiliki keterkaitan emosional, misalnya organisasi alumni.

Faktor internal berkaitan dengan kondisi internal dimana seseorang atau kelompok menghadapi situasi politik yang ada. Pemilihan presiden tahun 2019 di kota Makassar merupakan salah satu situasi politik yang mengakibatkan kondisi internal organisasi kemahasiswaan ekstra kampus berbeda. Kondisi internal berkaitan erat dengan keberadaan organisasi kemahasiswaan ekstra kampus dalam menyikapi dan melihat dinamika politik nasional dalam pemilihan umum pada lingkup daerah.

Setiap elemen masyarakat dituntut untuk terlibat aktif dalam setiap proses perubahan bangsa ini. Mahasiswa yang menjadi *agent of change* dituntut untuk dapat beradaptasi dengan setiap perubahan zaman. Organisasi mahasiswa ekstra kampus tentunya memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perubahan tersebut, ditambah keterlibatan mereka dalam merespon dan menyoroti agenda politik apapun dalam proses pemilihan calon pemimpin negara.

Di negara dunia ketiga seperti Indonesia, status dan gerakan mahasiswa sangat penting sebagai agen perubahan karena tekanan politik ekstra parlementer merupakan mekanisme yang efektif untuk mengontrol pemimpin (Akbar, 2016). Kontrol atas pemimpin dapat dilakukan melalui agenda politik apa pun. Nantinya, rakyat akan memilih pemimpinnya sehingga kader-kader organisasi kemahasiswaan ekstra kampus sebagai penerus bangsa harus konsisten dalam menjalankan pendewasaannya dalam berpolitik dan berdemokrasi.

Selain demonstrasi jalanan, momen politik elektoral menjadi peluang kontrol politik dengan menelaah setiap visi dan misi, dan kebijakan yang telah direncanakan oleh calon pemimpin. Kontrol politik merupakan bagian esensial dari negara demokrasi untuk mengawal setiap kebijakan pemerintahan agar tidak bersifat absolut.

Bentuk kontrol politik merupakan implementasi dari wacana partisipasi politik. Kontrol politik yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan ekstra kampus dalam pemilihan presiden tahun 2019 di kota Makassar bervariasi. Pada agenda politik pemilu, proses kontrol meninjau visi dan misi kandidat, diskusi, dialog, kajian, dan kontrol langsung. Menurut

Almond, sebagaimana dikutip dalam Mas'ood (2008), diskusi merupakan bagian dari partisipasi politik konvensional.

Selain diskusi politik, komunikasi seseorang juga merupakan partisipasi politik konvensional. Komunikasi individu merupakan hubungan antara organisasi kemahasiswaan ekstra kampus dengan beberapa individu dalam lingkup internal organisasi yang disebut dengan faktor eksternal.

Namun fenomena yang terlihat pada momentum pemilihan presiden tahun 2019 di kota Makassar adalah tidak adanya intervensi, apalagi jika intervensi tersebut merupakan intervensi politik. Organisasi alumni tidak berhak mencampuri pilihan politik organisasi kemahasiswaan ekstra kampus. Secara umum organisasi alumni hanya mendorong kader aktif untuk melaksanakan setiap program kerja dan mendampingi serta mendukung secara moril dan materil.

#### 4.1. Orientasi Politik Kognitif Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus

Orientasi politik kognitif adalah pengetahuan individu dan kelompok tentang kepercayaan dalam sistem politik (Almond & Verba, 1984). Orientasi politik kognitif adalah pengetahuan organisasi kemahasiswaan di luar kampus tentang menjalankan sistem politik. Kepercayaan dalam politik merupakan sikap yang ditanamkan oleh individu atau kelompok dalam mengikuti dan terlibat dalam pemilihan umum.

Kepercayaan politik terkait dengan partisipasi politik (Bourne, 2010). Individu yang memiliki keyakinan sosial cenderung memiliki partisipasi yang tinggi. Kepercayaan adalah kesiapan untuk menerima risiko berdasarkan ekspektasi positif (Rousseau *et al.*, 1998).

Begitupun dengan pengetahuan dan kepercayaan organisasi kemahasiswaan ekstra kampus terhadap penerapan sistem politik pada Pemilu 2019 di Kota Makassar, kepercayaan politik sangat erat kaitannya dengan partisipasi politik yaitu niat seseorang untuk memilih. Kepercayaan politik tidak hanya didasarkan pada keterlibatan seseorang atau kelompok dalam suatu sistem politik tetapi juga pada kedudukan organisasi yang mempercayai penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar.

Sinergi antar pemangku kepentingan sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Sinergi juga merupakan kombinasi/ elemen bagian yang dapat menghasilkan *output* yang lebih baik dan lebih besar jika dibangun secara tepat dengan stakeholders (Rahmawati, 2014). Lembaga penyelenggara pemilu adalah organisasi yang di dalamnya para aktor yang memiliki kepentingan. Kepentingannya adalah menegakkan demokrasi dalam mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan setiap elemen masyarakat yang terlibat dalam pemilihan umum, termasuk organisasi kemahasiswaan ekstra kampus.

Lembaga penyelenggara pemilu memiliki kewenangan konstitusional untuk mengatur penyelenggaraan pemilu. Adil atau tidaknya proses pemilu bergantung pada kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, lembaga penyelenggara pemilu harus didukung. Selain itu, kontrol terhadap lembaga penyelenggara pemilu juga penting karena masih banyak kendala yang dihadapi setiap proses pemilu, misalnya politik uang, ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara, dan beberapa pelanggaran pemilu lainnya. Oleh karena itu, sangat penting mendorong lembaga penyelenggara pemilu untuk tetap independen sehingga demokrasi tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga substansinya.

Adapun perannya yaitu membangun lembaga demokrasi yang kokoh dan andal. Oleh karena itu, pilar KPU sebagai lembaga penyelenggara publik yaitu kemandirian struktural,

kemandirian fungsional, dan kemandirian pribadi, harus konsisten dan dipertahankan (Marzuki, 2008).

Pemilu 2019 merupakan proses dalam sistem demokrasi untuk memilih calon pemimpin. Salah satu bagian penting dari sistem tersebut adalah aktor politik. Pelanggaran moral politik dalam praktik kehidupan politik berbangsa dan bernegara telah membawa para pemimpin, elit politik, dan pembuat kebijakan pada krisis moral dan krisis legitimasi moral. Krisis legitimasi moral menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat karena elit politik dan pembuat kebijakan melakukan tindakan yang melanggar moral. Masyarakat tidak lagi mendengarkan himbuan moral pemimpin karena pemimpin sering mencontohkan tindakan yang melanggar moral (Habermas, 1973).

Salah satu organisasi kemahasiswaan ekstra kampus yang bertumpu pada keyakinan politik pada penguatan moral politik adalah PMKRI cabang Makassar. Ada beberapa alasan mengapa PMKRI mendorong moral politik dalam agenda politik, seperti pemilihan umum. Pertama, pendidikan moral dan politik merupakan aspek baru yang belum diterapkan di PKMRI untuk menumbuhkan moralitas mahasiswa. Kedua, ada kesenjangan antara pendidikan moral dan politik sebagai *imperative* kategorikal dan *obligation* moral di satu sisi dan praktik dan praksis politik di sisi lain. Akibatnya, politisi dan birokrat pemerintah mengangkangi nilai moral dan prinsip moral. Pragmatisme dan irasionalitas telah mengkooptasi politik (Sayangan, 2015).

Moral politik memiliki hubungan yang signifikan dengan etika politik. Menurut Muchson (2004), tuntutan etika politik untuk menuntut hak masyarakat untuk mengatur atau mengatur masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Etika politik merupakan anak perusahaan, yaitu membantu membahas masalah ideologis secara objektif, berdasarkan argumen yang dapat diterima oleh semua yang memahami masalah tersebut. Etika politik hanya memberikan tolak ukur orientasi dan pedoman normatif untuk menilai kualitas tatanan kehidupan politik (Suseno, 1986).

Moral politik memiliki hubungan yang signifikan dengan etika politik. Menurut Muchson (2004), tuntutan etika politik untuk menuntut hak masyarakat untuk mengatur atau mengatur masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Tugas etika politik merupakan subsider, yaitu membantu pembahasan masalah ideologis secara objektif, berdasarkan argumentasi yang dapat diterima oleh semua yang memahami masalah tersebut. Etika politik hanya memberikan tolak ukur orientasi dan pedoman normatif untuk menilai kualitas tatanan kehidupan politik (Suseno, 1986). Pengetahuan dan kepercayaan pada lembaga penyelenggara pemilu dan penguatan moral aktor politik; titik kontakannya adalah masyarakat. Masyarakat sebagai pemilih bagi pemimpin merupakan salah satu kunci proses pemilihan umum.

Setelah Perang Dunia II, banyak negara menerapkan sistem demokrasi melalui pemilihan umum. Pemilihan umum selain pemilihan kepala daerah juga merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan kebebasan berpendapat bagi masyarakat dalam memilih pemimpin, dan juga dapat bermanfaat sebagai wadah penilaian langsung masyarakat kepada pemimpin yaitu dengan memberikan kembali suara mereka jika pemimpin tersebut benar-benar berkualitas. Pada titik ini, pemilu menjadi suatu gagasan tentang demokrasi dan kedaulatan rakyat (Arrsa, 2014).

Pilpres 2019 di kota Makassar bukan hanya momentum temporal yang berakhir di bilik suara. Namun, pemilihan umum 2019 menjadi agenda rakyat. Agenda masyarakat yang durasi pemilihannya kurang lebih 5 hingga 10 menit ada di TPS, namun pengaruhnya hingga lima tahun ke depan. Calon pemimpin yang terpilih di TPS, baik atau tidak, tergantung masyarakat.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mendorong perspektif bahwa agenda pemilu 2019 adalah agenda masyarakat, bukan aktor politik, kelompok, atau partai politik.

Setiap elemen masyarakat pasti memiliki pengetahuan dan keyakinan yang berbeda tentang pemilu. Pengetahuan dan keyakinan ini bisa berasal dari penyelenggara pemilu, penguatan moral politik dan masyarakat. Namun, ada juga elemen masyarakat yang pengetahuan dan keyakinannya bertumpu pada suatu sistem. Sistem yang dimaksud saat ini belum diterapkan di Indonesia yaitu sistem demokrasi melainkan sistem negara Islam. Organisasi mahasiswa ekstra kampus yang mendorong penerapan sistem negara Islam di Indonesia adalah Gema Pembebasan. GEMA Pembebasan meyakini bahwa menerapkan sistem negara Islam adalah jalan menuju kebaikan.

GEMA Pembebasan memahami bahwa dakwah adalah mengajak orang lain ke jalan kebaikan dan menjalani hidup berdasarkan ideologi dan kaidah Islam. Dakwah juga bertujuan mengajak kembali secara total ke Islam dan meninggalkan aturan kufur yang membelenggu umat, seperti aturan demokratis, kapitalis, dan non-Islam (Lufaefi, 2018).

GEMA Pembebasan konsisten dengan perjuangan keyakinan politik dalam sistem dan ideologi Islam. Meski pemilihan presiden tahun 2019 menjadikan demokrasi sebagai sistem, namun sistem tersebut tidak mengikuti ajaran Islam. GEMA Pembebasan tidak akan pernah berpartisipasi atau dengan kata lain tidak memilih di TPS. Partisipasi adalah hak semua lapisan masyarakat. Bentuk partisipasi ini untuk mengawal setiap kebijakan pemerintah, namun untuk pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2019 di TPS, kader GEMA diinstruksikan untuk tidak ikut serta.

Sebagai organisasi dakwah, GEMA Pembebasan dengan tegas menjadikan Islam sebagai ideologi; itu baru dalam gerakan mahasiswa. Apalagi, gerakan tersebut disandingkan dengan politik elektoral, seperti Pilpres 2019. Terkait politik elektoral, GEMA Pembebasan menjalankan amanat dakwah dengan mengarusutamakan Islam. Dalam momentum Pilpres 2019 di Makassar, GEMA Pembebasan membagi politik menjadi dua komponen: (1) politik praktis; (2) politik partisipatif.

Politik praktis adalah aktor politik yang merupakan partai politik dan ikut serta dalam politik elektoral pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Politik partisipatif menurut GEMA Pembebasan adalah dalam rangka pengawasan kebijakan negara. Secara umum, pada momentum pemilihan presiden tahun 2019 di kota Makassar, GEMA Pembebasan menempuh jalur politik partisipatif untuk mengawal segala kebijakan negara atau memperbaiki permasalahan yang ada di sekitar masyarakat kota Makassar.

## **4.2. Orientasi Politik Afektif Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus**

Orientasi politik afektif berkaitan dengan perasaan dan peran seseorang atau kelompok terhadap sistem politik dan aktor politik yang dapat memutuskan untuk menerima atau menolak sistem (Almond & Verba, 1984). Pemilu 2019 merepresentasikan struktur politik di mana sebagian orang bekerja berdasarkan kesepakatan politik. Peran organisasi kemahasiswaan ekstra kampus dalam pemilihan presiden 2019 bervariasi.

Salah satu peran organisasi kemahasiswaan ekstra kampus dalam pemilihan presiden 2019 di kota Makassar adalah mengikuti kegiatan demokrasi sukarela. Salah satunya adalah organisasi kemahasiswaan ekstra kampus yaitu HMI cabang Makassar. Peran HMI cabang Makassar dalam proses pemilihan umum mengikuti arahan Pengurus Besar HMI. Implementasi keterlibatan melalui program pengembangan aplikasi yang disebut i-Pantau. HMI menjalankan program ini untuk mengawasi dan memantau setiap pelanggaran pemilu yang sering terjadi.

Pelanggaran ini seringkali datang dari aktor politik lokal. Aktor politik merupakan salah satu kunci sukses sebuah agenda politik. Peran aktor sangat penting bagi keberhasilan demokrasi karena perilaku aktor dan kebijakan yang dihasilkan memiliki makna esensial dan mempengaruhi konsolidasi demokrasi (Zuhro, 2009).

Namun berbeda dengan kota Makassar. Meskipun keterlibatan beberapa aktor politik dalam pemilu memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pemerintahan, namun aktor politik tersebut perlu diseleksi dan dievaluasi. Dalam politik, itu adalah bagian dari pertempuran perang strategis yang bergantung pada kepentingan politik.

Fanatisme politik para aktor politik cenderung memutus rantai demokrasi yang lebih baik. Penting untuk memperkuat literasi politik untuk memerangi fenomena ini. Penggunaan literasi politik mengontrol pergerakan para aktor politik dalam membuat kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat.

Literasi politik merupakan wujud dari tindakan politik yang dapat dilakukan oleh elemen masyarakat untuk mengontrol setiap kebijakan pemerintah melalui media sosial, media cetak, dan media online. Berbeda dengan masa transisi menuju era reformasi, yang menonjol adalah gerakan pengawasan kebijakan pemerintah melalui demonstrasi, namun saat ini instrumen paling produktif untuk mengawal kebijakan adalah literasi politik.

Penguatan literasi politik merupakan salah satu cara untuk menjaga semangat kebangsaan. Menjaga semangat kebangsaan adalah sesuatu yang dilakukan menjelang dan pasca pemilihan umum tahun 2019. Cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan membina dan membangun kembali hubungan baik antar anak bangsa, seperti yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan ekstra kampus seperti GMKI cabang Makassar dan GMNI cabang Makassar.

Penguatan literasi politik merupakan salah satu cara untuk menjaga semangat kebangsaan. Menjaga semangat kebangsaan adalah sesuatu yang dilakukan menjelang dan pasca pemilihan umum tahun 2019. Cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan membina dan menjalin kembali hubungan baik antarwarga, seperti yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan ekstra kampus seperti GMKI cabang Makassar dan GMNI cabang Makassar.

Semangat yang dibangun oleh GMKI cabang Makassar dan GMNI cabang Makassar ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi organisasi kemahasiswaan ekstra kampus sebagai *agent of change*, dilaksanakan untuk menjaga dan menjalankan makna Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan di momentum pemilihan presiden tahun 2019, interpretasi makna Bhinneka Tunggal Ika dilakukan secara terbuka. Sikap yang diangkat oleh GMNI Cabang Makassar dalam Pilpres 2019 di kota Makassar adalah sikap terbuka dalam kegiatannya dengan membawa langsung nama GMNI cabang Makassar kepada masyarakat untuk memperkuat identitas organisasinya.

Keterlibatan organisasi kemahasiswaan ekstra kampus dalam Pilpres 2019 di Makassar tidak hanya bisa dilihat dari sisi keinginan organisasi untuk membangun sistem politik yang kokoh, namun identitas organisasi juga kerap diartikan sebagai isu keberpihakan politik. Identitas organisasi kemahasiswaan ekstra kampus sebagai perpanjangan tangan ormas Muhammadiyah di tingkat kampus yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

Sebelumnya, Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Selatan telah merekomendasikan kandidat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada pemilihan umum 2019. Kesamaan visi misi kandidat dengan ormas Muhammadiyah menjadi alasan untuk membuat rekomendasi. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan pernah merekomendasikan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2018. Rekomendasi ini adalah sikap yang gegabah dan salah. Untuk IMM cabang Makassar, jika mendukung penuh tentunya juga dengan cara yang egaliter, memberikan rekomendasi tanpa ada pengukuran. Artinya, Muhammadiyah dan beberapa turunannya tidak bisa diukur dari segi keberpihakan politik.

Orientasi politik afektif meliputi perasaan tentang sistem politik, peran, aktor, dan penampilan yang membuat seseorang menerima atau menolak suatu sistem politik (Almond & Verba, 1984). Indonesia menerapkan sistem politik demokrasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum. GEMA Pembebasan Cabang Makassar menolak sistem yang diterapkan dalam pemilihan umum yaitu sistem demokrasi. Sistem demokrasi yang dianggap liberal, sistem kapitalis, bukan sistem Islam yang berasal dari negara barat kemudian digunakan di Indonesia.

Di Indonesia, GEMA Pembebasan muncul karena tidak ada organisasi kemahasiswaan yang memiliki aspirasi untuk mengedepankan ideologi Islam dan menjadikan Islam sebagai solusi dari permasalahannya. Selama ini hanya gerakan yang fokus pada masyarakat, politik, dan perjuangan lainnya dengan mengesampingkan ideologi Islam (Lufaei, 2018).

Proses mengkampanyekan Islam sebagai ideologi yang dijalankan oleh GEMA Pembebasan berupaya menerapkan sistem negara Islam melalui jihad. Indonesia termasuk negara yang gagal menjalankan ideologi Islam. Dengan sistem demokrasinya, Indonesia banyak mengalami masalah, sehingga solusinya hanya satu, yaitu kekhalifahan. Munculnya gerakan mahasiswa yang mengedepankan ideologi Islam dikarenakan permasalahan bangsa yang belum terselesaikan hingga saat ini.

Kemunculan GEMA Pembebasan di Indonesia saat ini merupakan bentuk kekecewaan mereka terhadap rezim sebelumnya. Dalam konteks ini, GEMA Pembebasan merasa terpenggil dan berkewajiban untuk melanjutkan perjuangan politik Islam dengan merumuskan politik Islam ideologis dengan melaksanakan penerapan hukum Islam dalam mewujudkan ide kekhalifahan Islam (Chaidherrahman, 2015).

Hizbut Tahrir Indonesia pernah melontarkan gagasan kekhalifahan Islam, namun pada akhirnya pemerintah membubarkan organisasi tersebut. Namun ide tersebut tetap konsisten dijalankan dan dilanjutkan oleh organisasi kemahasiswaan ekstra kampus GEMA Pembebasan. Menurut GEMA Pembebasan, Pilpres 2019 di kota Makassar merupakan momentum pembuka untuk memulihkan kehidupan Islam di masyarakat. Kesadaran masyarakat bahwa Islam adalah rahmat bagi alam semesta, meski sebagian masyarakat tidak memahami dan membenci kekhalifahan, GEMA Pembebasan cabang Makassar akan terus menyebarkan dakwah tanpa kekerasan secara konsisten.

Orientasi politik afektif organisasi mahasiswa ekstra kampus pada Pilpres 2019 di Kota Makassar berbeda. Perbedaan tersebut muncul berdasarkan latar belakang, visi, misi, dan perjuangan ideologis masing-masing organisasi kemahasiswaan ekstra kampus.

### **4.3. Orientasi Politik Evaluatif Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus**

Orientasi politik evaluatif adalah keputusan dan pendapat tentang objek politik yang biasanya melibatkan nilai dan kriteria bersama dengan informasi dan perasaan. Penentuan orientasi ini melalui evaluasi moral seseorang atau kelompok dan juga terkait dengan evolusi normatif, moralitas politik, dan etika politik (Almond & Verba, 1984).

Organisasi mahasiswa ekstra kampus perlu mengevaluasi setiap proses pemilihan umum untuk memelihara sistem demokrasi yang lebih baik. Pilpres 2019 di kota Makassar menyimpan banyak fenomena yang diidentifikasi sebagai permasalahan yang sering muncul dalam proses politik pemilu, yaitu independensi media, netralitas pegawai negeri sipil, politik identitas, dan politik uang.

Membahas hubungan media dengan ranah politik merupakan dilema karena sikap pemberitaan media tidak sepenuhnya netral dari intervensi politik dan patronase kapital (Dhakidae, 1992). Ketidaknetralan media dalam menyajikan berita tidak diragukan lagi menjadi

masalah karena akan membuat masyarakat gegabah dalam memahami berita tersebut, ditambah lagi jika media menyajikan berita *hoax*. Diskursus keberpihakan media kepada pelaku politik atau entrepreneur bukanlah hal baru di Indonesia, namun diskursus ini selalu hadir dalam setiap agenda politik.

Media sangat rentan terhadap intervensi politik karena kepentingan pemilik media (Jati, 2013). Menurut Chomsky (2011), politisasi media terjadi ketika pemiliknya melakukan penetrasi politik praktis. Dalam agenda politik di kota Makassar, ada dua politisi yang menjadi pemegang saham media di Kota Makassar: 1) Munafri Arifuddin, menantu Aksa Mahmud, pengusaha pemilik koran *Tribun Timur* dan *makassar.tribunnews.com*. Kedua media tersebut berada di bawah jaringan *Bosowa Group*. 2) Moh. Ramdhan Pomanto, pemegang saham Koran *Sindo* (*Seputar Indonesia*), Makassar (*edunews.com*, 2018). Media perlu dievaluasi sebagai dasar penguatan informasi kepada publik. Jika kandidat pada pemilu 2019 memiliki jaringan media, kecil kemungkinan media di kota Makassar akan memproduksi berita independen.

Selain itu, fenomena yang terjadi di kota Makassar pada momentum Pilpres 2019 adalah fenomena tidak netral Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara tidak boleh berpihak pada kepentingan politik siapapun. Aparatur Sipil Negara harus menjaga sikap netral dalam pemilihan umum.

Perlu dilakukan evaluasi terhadap fenomena keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam Pilpres 2019 agar sistem demokrasi berjalan dengan baik. Menurut data Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar, keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam mendukung salah satu calon ada 15 orang (*Tribun Makassar*, 2019).

HMI Cabang Makassar dan PMKRI Cabang Makassar mendorong agenda politik krusial berikutnya untuk mendorong netralitas Aparatur Sipil Negara dan independensi media. Aparatur Sipil Negara tidak boleh berpihak pada kelompok manapun, apalagi ikut memperebutkan kursi kekuasaan (*Fatkhuri & Syarbaini*, 2019). Alasan utama keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam politik praktis adalah bagian dari kontrak politik dengan aktor atau kandidat politik tertentu karena jika tidak, maka posisi yang akan dipertaruhkan dan ancaman mutasi bisa terjadi. Aparatur Sipil Negara akan berpikir logis daripada kehilangan jabatan, mutasi, atau tidak diberi ruang oleh pimpinan yang terlibat dalam politik praktis; satu-satunya cara adalah mendukung salah satu kandidat.

Dinamika politik Pilpres 2019 di kota Makassar tampak sedang berada pada suhu politik yang tinggi. Munculnya fenomena ini dikarenakan agenda pemilihan presiden yang bertepatan dengan pemilihan legislatif yang memecah belah masyarakat Kota Makassar. Aktor politik yang terlalu fanatik terhadap calon masing-masing memberi kesan bahwa aktor politik sedang menuju proses pendewasaan politik. Tidak jelas apakah gagasan dan wacana para aktor politik, perdebatan di ruang maya hanya berkisar pada "Cebong" dan "Kampret".

Unsur penting dalam sistem politik adalah mahasiswa yang dapat memberikan masukan dan kritik untuk membangun sistem politik yang lebih baik. Penguatan aksi politik praktis dalam agenda politik merupakan tantangan bagi sistem yang disebut demokrasi. Dibutuhkan keterlibatan aktif setiap elemen masyarakat, termasuk organisasi kemahasiswaan ekstra kampus. Selain politik praktis, masalah masyarakat adalah penguatan suku, ras, agama, dan politik uang. Isu ini tampaknya menarik bagi para aktor politik yang tidak bertanggung jawab atas suatu kelompok atau kepentingan pribadi.

Organisasi mahasiswa ekstra kampus tersebut menilai bahwa politik praktis hanya akan merusak persatuan bangsa karena perbedaan pilihan politik. Ada ancaman terhadap keutuhan bangsa dalam setiap agenda politik yang bersumber dari penguatan politik identitas melalui

isu Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan atau disebut SARA dan mudah diangkat oleh aktor atau kelompok kepentingan tertentu dalam politik.

Operasionalisasi politik identitas yang bersifat kultural akan menempati tiga ranah publik yang menjadi sumber konflik berbagai kepentingan budaya:

- 1) Peran operasionalisasi politik identitas dijalankan secara optimal melalui pemerintahan.
- 2) Bidang agama.
- 3) Politik identitas beroperasi melalui pembagian kekuasaan, di mana identitas kelompok akan memasukkan kepentingan identitasnya dengan cara tertentu.

Komunikasi politik dalam negeri menentukan dinamika arus politik (Lestari, 2018). Aktor politik sering membuat isu SARA untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya penolakan kedatangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno dan tim Neno Warisman di kota Makassar oleh PMKRI, GMKI, PMKRI, dan PMII (merdeka.com, 2018).

Masalah yang sering terjadi dalam setiap agenda politik pemilu adalah politik uang. Menurut Aspinall & Berenschot (2019), peningkatan politik uang menghambat peningkatan integritas politik elektoral. Pada Pilpres 2019 di kota Makassar, fenomena politik uang merupakan perilaku keliru yang ditolak oleh organisasi kemahasiswaan ekstra kampus seperti PMII dan GMNI. Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar, seorang politikus dari Partai Persatuan Pembangunan melakukan kasus politik uang. Partai Persatuan Pembangunan merupakan koalisi partai pendukung pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Setiap agenda politik pasti selalu menghadapi masalah politik uang (kompas.com, 2019).

Jalan menuju sistem demokrasi yang lebih baik menuntut semua elemen masyarakat, termasuk organisasi mahasiswa ekstra kampus, penyelenggara pemilu, dan masyarakat, untuk membangun semangat solidaritas. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat solidaritas adalah dengan bersinergi antar sesama organisasi kemahasiswaan ekstra kampus untuk meminimalisir kecurangan dalam proses Pilpres 2019 di kota Makassar. Dibutuhkan sinergi antara organisasi kemahasiswaan dan lembaga penyelenggara publik. Sinergi antara organisasi kemahasiswaan dan lembaga penyelenggara merupakan salah satu cara untuk meminimalisir tindakan yang dapat merugikan masyarakat.

Momentum Pilpres 2019 di kota Makassar memiliki banyak fenomena. Perlu dilakukan evaluasi terhadap fenomena kasuistik seperti kotak suara yang terbuat dari karton dan kasus kematian petugas TPS. Proses evaluasi tidak hanya pada mekanisme pemilihan umum tetapi juga pada sistem pemilihan umum.

Organisasi mahasiswa ekstra kampus yang lebih menekankan pada orientasi politik evaluatif kasuistik adalah GEMA Pembebasan. Organisasi mahasiswa ekstra kampus ini cenderung berbeda dengan organisasi lain. Konsep dasar orientasi politik evaluatif adalah fenomena kotak suara yang terbuat dari karton, gangguan jiwa, dan surat suara yang dicoblos dianggap dapat mempengaruhi masyarakat untuk kehilangan kepercayaan politiknya. Selain itu, GEMA Pembebasan mengangkat masalah evaluasi mekanisme pemilihan umum yang menggunakan sistem kekhalifahan Islam daripada sistem demokrasi. Munculnya beberapa aktor politik yang didorong oleh para ulama menunjukkan bahwa kesadaran publik semakin vital untuk perubahan yang lebih baik.

Pilpres 2019 merepresentasikan sistem demokrasi yang di dalamnya terdapat unsur kebebasan. Kebebasan sering kali diterjemahkan ke dalam hal-hal tanpa batas atau kendali. Salah satu cara mengendalikan sistem demokrasi adalah dengan aktif dalam organisasi kemahasiswaan ekstra kampus untuk mengawal setiap agenda politik di Indonesia sehingga melahirkan pandangan bersama bahwa sistem demokrasi itu tidak sempurna. Studi tentang orientasi politik organisasi mahasiswa ekstra kampus dapat menguji pandangan bersama ini.

Kajian tentang orientasi politik mencapai bentuk keterlibatan, sikap, dan pandangan seseorang atau kelompok dan memberikan catatan penting untuk agenda politik masa depan yang lebih baik.

## 5. Kesimpulan

Faktor internal berkaitan dengan kondisi internal organisasi kemahasiswaan ekstra kampus dalam pemilihan presiden 2019 di kota Makassar. Kondisi internal organisasi kemahasiswaan ekstra kampus di kota Makassar ini antara lain: HMI mendorong kadernya untuk matang secara politik dan demokratis. PMKRI menjaga netralitas dan idealisme kader, dan GMKI menjaga keutuhan bangsa dan negara. Selain itu, GMNI melakukan pengawasan terhadap pemerintah dengan melakukan dialog dan diskusi. Sementara itu, PMII menyiratkan bahwa agenda politik pilpres 2019 adalah ajang pembelajaran dan menolak politik praktis. IMM mengawal visi dan misi calon dengan melakukan kajian. KAMMI dan GEMA Pembebasan mengawasi setiap kebijakan pemerintah.

Faktor eksternal berkaitan dengan pengaruh dari luar organisasi kemahasiswaan ekstra kampus yaitu organisasi alumni. Kedelapan ormas tersebut menyatakan tidak ada intervensi untuk memilih satu pasangan calon pada Pilpres 2019 di Kota Makassar berdasarkan arahan organisasi alumni. Ada intervensi tetapi dengan cakupan individual di organisasi kemahasiswaan ekstra kampus, seperti yang dialami oleh PMKRI, GMKI, PMII, IMM, dan KAMMI. Organisasi alumni hanya mendukung program kerja masing-masing, berupa dukungan baik moril maupun materil.

Orientasi politik kognitif organisasi kemahasiswaan ekstra kampus yang terdiri dari HMI, GMKI, GMNI, IMM, dan KAMMI adalah kepercayaan politik bertumpu pada penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, Badan Pengawas Pemilu, dan PMII. mengandalkan kepercayaan politik mereka pada masyarakat. Berbeda dengan PMKRI yang bertumpu pada keyakinan politik pada penguatan moral politik sebagai wujud pengetahuan dalam sistem politik, dan GEMA Pembebasan secara konsisten menempatkan kepercayaan politiknya pada sistem negara Islam. GEMA Pembebasan menginstruksikan kepada kadernya untuk tidak mencoblos di TPS karena Pilpres 2019 menggunakan sistem demokrasi.

Orientasi politik afektif berkaitan dengan perasaan dan peran seseorang atau kelompok terhadap sistem politik dan aktor politik yang dapat memutuskan untuk menerima atau menolak sistem tersebut. Orientasi politik afektif organisasi kemahasiswaan ekstra kampus pada Pilpres 2019 di kota Makassar antara lain: 1) sejalan dengan visi dan misi organisasi, keberadaan senior yang terlibat sebagai aktor politik, pemilihan umum sebagai sarana penguatan pengetahuan di bidang politik dan demokrasi. 2) aktor politik sedang dalam proses kematangan politik. 3) bersinergi dengan organisasi kepemudaan lainnya. 4) menjadi relawan Badan Pengawas Pemilu dalam rangka penguatan pendidikan politik. 5) menyukseskan agenda politik dengan memberikan pendampingan dan pencerahan bagi masyarakat untuk menjadi pemilih yang baik. 6) Pilpres 2019 membawa fenomena polarisasi komunitas. 7) Pilpres 2019 terkait pertukaran berbagai kepentingan.

Orientasi politik evaluatif berkaitan dengan keputusan dan pendapat seseorang atau kelompok tentang objek politik. Penetapan orientasi ini melalui evaluasi moral seseorang atau kelompok dan juga terkait dengan evaluasi normatif, moralitas politik, dan etika politik. Orientasi politik evaluatif organisasi kemahasiswaan ekstra kampus dalam Pilpres 2019 di kota Makassar terdiri dari masalah media, moral politik, etika politik, netralitas Aparatur Sipil Negara, isu SARA, politik uang, rekrutmen penyelenggara pemilu, dan mekanisme pemilu 2019.

## 6. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu selama penelitian ini dilakukan.

## 7. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Akbar, I. (2016). Demokrasi dan Gerakan Sosial (Bagaimana Gerakan Mahasiswa Terhadap Dinamika Perubahan Sosial). *Jurnal Wacana Politik*, 1(2), 107–115. <https://doi.org/10.24198/jwp.v1i2.11052>
- Akbar, S. I., & Khairulyadi. (2018). Sosialisasi dan Afiliasi Partai Politik: Analisa Kecenderungan Mahasiswa Terhadap Partai Politik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1), 75–85. Retrieved from <https://jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/6034>
- Almond, G., & Verba, S. (1984). *Budaya Politik (Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara Group.
- Arrsa, R. C. (2014). Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 516–573. Retrieved from <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/38>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientalism and the State in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Berita Bojonegoro. (2015, September 21). Sejarah Gerakan Mahasiswa dari Masa ke Masa. Retrieved from <https://beritabojonegoro.com/read/960-sejarah-gerakan-mahasiswa-dari-masa-ke-masa.html>
- Berita Kota Makassar. (2018, September 15). HMI Ajak Mahasiswa Kawal Pileg dan Pilpres. Retrieved from <https://beritakotamakassar.com/berita/2018/09/15/hmi-ajak-mahasiswa-kawal-pileg-dan-pilpres/>
- Bourne, P. A. (2010). Modelling Political Trust in a Developing Country. *Current Research Journal of Social Science*, 2(2), 84–98. Retrieved from <https://maxwellsci.com/jp/abstract.php?jid=CRJSS&no=38&abs=06>
- Chaidherrahman, M. (2015). *Gerakan Mahasiswa Pembebasan di Kota Makassar (2002-2013)* (Diploma Thesis). Universitas Negeri Makassar. Retrieved from <http://eprints.unm.ac.id/1914/>
- Chomsky, N. (2011). *Media Control: The Spectacular Achievement of Propaganda*. Toronto, Canada: Open Media Books.
- Dhakidae, D. (1992). *The State, the rise of capital and the fall of political journalism: Political economy of Indonesian new industry*. Madison: University of Wisconsin-Madison Press.
- Di Battista, S., Pivetti, M., & Berti, C. (2018). Moral Foundations, Political Orientation and Religiosity In Italy. *The Open Psychology Journal*, 11(1), 46–58. <https://doi.org/10.2174/1874350101811010046>
- Edunews.id. (2018, January 26). Pemilik Media dalam Arena Pilkada Makassar. Retrieved from <https://www.edunews.id/literasi/opini/pemilik-media-dalam-arena-pilkada-makassar>

- Fadli, Z. (2018). Orientasi Politik Aktivistis Eks Hizbut Tahrir Indonesia Pasca Dibubarkan. *Kontekstualita*, 33(02), 169–189. <https://doi.org/10.30631/kontekstualita.v35i02.133>
- Farzianto, R., & Rafni, A. (2020). Orientasi Politik Santri Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. *Journal of Civic Education*, 3(1), 101–109. <https://doi.org/10.24036/jce.v3i1.338>
- Fatkhuri & Syarbaini, S. (2019). Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada: Studi Kasus Pilkada Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 4(2), 104–118. <https://doi.org/10.24905/jip.4.2.2019.104-118>
- Habermas, J. (1973). *Legitimation Crisis*. Boston: Beacon Press.
- Jati, W. R. (2013). Politik Persuasif Media: Peran Media Dalam Pemilu Presiden Indonesia 2001-2009. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(2), 15–30. <https://doi.org/10.14203/jpp.v10i2.432>
- Joeseof, D. (1978). *Normalisasi Kehidupan Kampus dan Bentuk Penataan Kembali Kehidupan Kampus*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kompas.com. (2019, May 27). Caleg PPP di Makassar Terbukti Lakukan Politik Uang. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2019/05/27/18522631/caleg-ppp-di-makassar-terbukti-lakukan-politik-uang>
- Kurniawan, M. W. (2017). Orientasi Politik dan Bentuk Keterlibatan Paguyuban Mahasiswa Bengkalis di Pekanbaru Pada Pilkada Bengkalis Tahun 2015. *Jurnal online mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (e-journal)*, 4(2), 1–12. Retrieved from <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/15090>
- Leny, L., & Suyasa, T. Y. S. (2010). Keaktifan Berorganisasi dan Kompetensi interpersonal. *Phronesis*, 8(1), 71–99. Retrieved from <https://philpapers.org/rec/LENKBD>
- Lestari, F. (2018). Isu SARA (Suku, Agama, Ras Antar Golongan) Dalam Pemilu/Pilkada. *INTERAKTIF Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(2), 154–170. Retrieved from <https://interaktif.ub.ac.id/index.php/interaktif/article/view/155>
- Lubis, S. B. H. (2008). *Pengantar Teori Organisasi*. Bandung, Indonesia: PPS Uninus Bandung.
- Lufaei. (2018). Membaca Gerak Dakwah Gerakan Mahasiswa Pembebasan: Sisi Politis dan Efeknya. *HAYULA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2(2), 103–116. <https://doi.org/10.21009/hayula.002.2.01>
- Marzuki, S. (2008). Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(3), 493–412. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art8>
- Mas'ood, M. (2008). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Merdeka.com. (2018, August 6). PMII tolak Neno Warisman ke Makassar: Jika nekat datang, kami adang di bandara. Retrieved from <https://www.merdeka.com/peristiwa/pmii-tolak-neno-warisman-ke-makassar-jika-nekat-datang-kami-adang-di-bandara.html>
- Muchson, A. R. (2004). Dimensi Moral Dalam Kekuasaan Politik. *Jurnal Civics*, 1(2), 130–140. Retrieved from <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/5711/4933>
- Muhammad, A. (2000). *Komunikasi Organisasi*. Jakarta, Indonesia: PT Bumi Aksara.
- Pareek, U. (1996). *Perilaku Keorganisasian*. Jakarta, Indonesia: PT Ikrar Mandiri Abadi.
- Rahmawati, T. (2014). Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah (Studi Pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(4), 641–647. Retrieved from <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/435>
- Rousseau, D. M., Sitkin, S. B., Burt, R. S., & Camerer, C. (1998). Not so different after all: A cross-discipline view of trust. *Academy of Management Review*, 23(3), 393–404. <https://doi.org/10.5465/AMR.1998.926617>

- Sayangan, Y. V. (2015). Pengembangan Model Pelatihan Moral Politik Bagi Ormas PMKRI dengan Pendekatan Deduktif Berbasis Refleksi. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 17(1), 37–49. Retrieved from <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jtp/article/view/5391>
- Serikat News. (2019, May 28). Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Cipayung Plus Kota Makassar Berikan Dukungan Moril ke Kapolri. Retrieved from <https://serikatnews.com/pasca-kerusuhan-21-22-mei-cipayung-plus-kota-makassar-berikan-dukungan-moril-ke-kapolri/>
- Sjamsuddin, N. (1993). *Dinamika Sistem Politik Indonesia*. Jakarta, Indonesia: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2013). *Penelitian Kualitatif dan R & D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Sumtahi, E. (2003). *Syari'at Urgensi dan Konsekuensinya Islam: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Komunitas Nisita.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta, Indonesia: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suseno, F. M. (1986). *Kuasa dan Moral*. Jakarta, Indonesia: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tribun Makassar. (2016, November 3). Enam Organisasi Kemahasiswaan di Makassar Tolak Demo Ahok. Retrieved from <https://makassar.tribunnews.com/2016/11/03/enam-organisasi-kemahasiswaan-di-makassar-tolak-demo-ahok>
- Tribun Makassar. (2019, August 30). Terkait Video Dukungan Capres, Ini Daftar Nama Eks Camat di Makassar Kena Sanksi Berat KASN. Retrieved from <https://makassar.tribunnews.com/2019/08/30/terkait-video-dukungan-capres-ini-daftar-nama-eks-camat-di-makassar-kena-sanksi-berat-kasn>
- Yunita, R. P., & Stanislaus, S. (2014). Orientasi Politik Pemilih Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014. *Journal of Social and Industrial Psychology*, 3(1), 69–76. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/sip/article/view/3747>
- Zuhro, R. S. (2009). *Demokrasi Lokal: Peran Aktor Dalam Demokratisasi*. Jakarta, Indonesia: Ombak.

---

### Tentang Penulis

1. **Fathullah Syahrul**, mahasiswa pascasarjana Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia.  
E-Mail: [fathullah18001@mail.unpad.ac.id](mailto:fathullah18001@mail.unpad.ac.id)
2. **Caroline Paskarina**, memperoleh gelar Doktor dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2016. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia.  
E-Mail: [caroline.paskarina@unpad.ac.id](mailto:caroline.paskarina@unpad.ac.id)
3. **R Widya Setiabudi Sumadinata**, memperoleh gelar Doktor dari Universitas Padjadjaran, Indonesia, pada tahun 2012. Penulis adalah dosen pada Program Studi Doktor Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia.  
E-Mail: [wsetiabudi@unpad.ac.id](mailto:wsetiabudi@unpad.ac.id)